

Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Publik

CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES FOR PUBLIC COMPANIES

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015.

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles in compliance with the provisions of OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status Status
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Aspect 1: Relations between Public Companies and Shareholders in Assuring Shareholders' Rights		
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1 Increase the value of the general meetings of shareholders (GMS)	<p>Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>The company should have procedures for voting, whether open or closed, that protect the shareholders' independence and interests.</p>	<p>Terpenuhi. Prosedur ini disampaikan pada aturan RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham pada setiap RUPS.</p> <p>Comply. The procedure is articulated in the GMS rules that are distributed to shareholders at each GMS.</p>
	<p>Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>All members of the Board of Directors and Board of Commissioners attend the annual general meeting of shareholders.</p>	<p>Sebagian besar terpenuhi. Beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdomisili di luar Indonesia sehingga tidak semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat hadir dalam satu rapat.</p> <p>Mostly comply. As some of the members of the Boards of Directors and Commissioners are domiciled abroad, not all of them may be in attendance at any one meeting.</p>
	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>A summary of the minutes of AGMs should be available on the company's website for at least one year.</p>	<p>Terpenuhi. Risalah RUPS tersedia pada www.matahari.co.id untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.</p> <p>Comply. Minutes are available at www.matahari.co.id indefinitely.</p>
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Principle 2 Strengthen the quality of communications between public companies and their shareholders or investors.	<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>The company should have a policy on communications with its shareholders or investors.</p>	<p>Terpenuhi. Perseroan melakukan pembaruan secara rutin terkait kinerjanya melalui pelaporan pendapatan kuartalan.</p> <p>Comply. The Company provides regular updates regarding the company's performance through quarterly earnings calls.</p>
	<p>Kebijakan komunikasi harus diungkapkan di Situs Web.</p> <p>The communications policy should be disclosed on the website.</p>	<p>Terpenuhi. Perseroan telah menyediakan bahan untuk setiap Earnings Call, conference, serta materi presentasi yang dapat diunduh dari situs web Perseroan untuk memberikan kesetaraan kepada seluruh pemegang saham atas pelaksanaan komunikasi dengan Perseroan.</p> <p>Comply. The Company has provided the materials for every Earnings Call, conference, as well as presentation materials which can be downloaded from the Company's website to give equality to all shareholders for the implementation of the communication with the Company.</p>

Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Publik

CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES FOR PUBLIC COMPANIES

Implementasi Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015.

Implementation of Corporate Governance Aspects and Principles in compliance with the provisions of OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status Status
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Aspect 1: Relations between Public Companies and Shareholders in Assuring Shareholders' Rights		
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1 Increase the value of the general meetings of shareholders (GMS)	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. The company should have procedures for voting, whether open or closed, that protect the shareholders' independence and interests.	Terpenuhi. Prosedur ini disampaikan pada aturan RUPS yang dibagikan kepada pemegang saham pada setiap RUPS. Comply. The procedure is articulated in the GMS rules that are distributed to shareholders at each GMS.
	Seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and Board of Commissioners attend the annual general meeting of shareholders.	Sebagian besar terpenuhi. Beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdomisili di luar Indonesia sehingga tidak semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat hadir dalam satu rapat. Mostly comply. As some of the members of the Boards of Directors and Commissioners are domiciled abroad, not all of them may be in attendance at any one meeting.
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. A summary of the minutes of AGMs should be available on the company's website for at least one year.	Terpenuhi. Risalah RUPS tersedia pada www.matahari.co.id untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Comply. Minutes are available at www.matahari.co.id indefinitely.
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Principle 2 Strengthen the quality of communications between public companies and their shareholders or investors.	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The company should have a policy on communications with its shareholders or investors.	Terpenuhi. Perseroan melakukan pembaruan secara rutin terkait kinerjanya melalui pelaporan pendapatan kuartalan. Comply. The Company provides regular updates regarding the company's performance through quarterly earnings calls.
	Kebijakan komunikasi harus diungkapkan di Situs Web. The communications policy should be disclosed on the website.	Terpenuhi. Perseroan telah menyediakan bahan untuk setiap Earnings Call, conference, serta materi presentasi yang dapat diunduh dari situs web Perseroan untuk memberikan kesetaraan kepada seluruh pemegang saham atas pelaksanaan komunikasi dengan Perseroan. Comply. The Company has provided the materials for every Earnings Call, conference, as well as presentation materials which can be downloaded from the Company's website to give equality to all shareholders for the implementation of the communication with the Company.

Prinsip
Principle

Rekomendasi
Recommendation

Status
Status

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Aspect 2: Function and Role of the Board of Commissioners

Prinsip 3
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
Principle 3
Strengthen the membership and composition of the Board of Commissioners

Kondisi Perseroan senantiasa menjadi landasan pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Dewan Komisaris.
The condition of the company should be considered in determining the number of members of the Board of Commissioners.

Terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
Comply. The number of members of the Board of Commissioners is in accordance with the relevant capital market regulation.

Penentuan komposisi Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.
The composition of the Board of Commissioners should take into account the range of expertise, knowledge, and experience required by the Company.

Terpenuhi. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan latar belakang keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.
Comply. The Board members represent the range of expertise, knowledge, and experience required by the Company.

Prinsip 4
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Principle 4
Strengthen the quality of execution of the Board of Commissioners' duties and responsibilities.

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
The Board of Commissioners should have a policy on self-assessment to evaluate its performance.

Terpenuhi. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) secara berkala untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
Comply. The Board of Commissioners has a policy on the regular evaluation of its performance by self-assessment.

Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) harus diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.
The self-assessment policy should be disclosed in the company's annual report.

Terpenuhi. Kebijakan dan kriteria diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
Comply. The policy and criteria are stated in the Annual Report.

Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
The Board of Commissioners should have a policy on the resignation of board members who are involved in financial crimes.

Terpenuhi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, setiap anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dengan alasan apapun termasuk di dalamnya adalah terlibat kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Dewan Komisaris akan batal demi hukum. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS.
Comply. Based on the Company's Articles of Association, any member of the Board of Commissioners who is not qualified to be a member of the Board of Commissioners for any reason, including involvement in financial crimes, will have his/her position as a member of the Board declared null and void. If the Board member resigns, it will be decided through the GMS.

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status Status
	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi Anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners or the committee that performs the nomination and remuneration functions should have a succession policy for members of the Board of Directors.</p>	<p>Terpenuhi. Komite Nominasi dan Remunerasi, yang diketuai oleh anggota Dewan Komisaris, telah menetapkan kebijakan suksesi Direksi.</p> <p>Comply. The Nomination and Remuneration Committee, which is chaired by a member of BoC, has put in place a succession policy for the Board of Directors.</p>
<p>Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi Aspect 3: Function and Role of the Board of Directors</p>		
<p>Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Principle 5 Strengthen the membership and composition of the Board of Directors.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>The condition of the company and effectiveness in decision making should be considered in determining the number of members of the Board of Directors.</p>	<p>Terpenuhi. Kondisi Perseroan dan pengambilan keputusan yang efektif senantiasa menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota Direksi.</p> <p>Comply. Both the Company's condition and effective decision making were taken into consideration in determining the number of members of the Board of Directors.</p>
	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The composition of the Board of Directors should take into account the range of expertise, knowledge and experience required by the Company.</p>	<p>Terpenuhi. Komposisi Direksi saat ini sudah mencerminkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perseroan.</p> <p>Comply. The current composition of the Board of Directors reflects the range of expertise, knowledge and experience required by the Company.</p>
	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance functions should have expertise in and/or knowledge of accounting.</p>	<p>Terpenuhi. Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan dalam Perseroan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang ini sebagaimana dapat dilihat pada bagian Profil Direksi.</p> <p>Comply. The Director supervising the accounting and finance aspects of the Company has adequate knowledge and experience in this field, as confirmed in the Board of Directors' Profile.</p>
<p>Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Principle 6 Strengthen the quality of execution of the Board of Directors' duties and responsibilities.</p>	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors should have a policy on self-assessment to evaluate its performance.</p>	<p>Terpenuhi. Direksi memiliki kebijakan self-assessment yang dilakukan secara berkala berdasarkan KPI mereka, yang hasilnya ditinjau oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Comply. The Board of Directors has a policy on regular self-assessment based on their KPIs, the results of which are reviewed by the Nomination and Remuneration Committee.</p>
	<p>Kebijakan penilaian sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy should be disclosed in the company's annual report.</p>	<p>Terpenuhi. Kebijakan dan kriteria telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan.</p> <p>Comply. The policy and criteria are stated in the Annual Report.</p>

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status Status
	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors should have a policy on the resignation of board members who are involved in financial crimes.</p>	<p>Terpenuhi. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Direksi dengan alasan apapun, termasuk dalam hal keterlibatan kejahatan keuangan maka jabatannya sebagai Direksi akan batal demi hukum. Dalam hal anggota Direksi tersebut mengundurkan diri maka akan diputuskan dalam mekanisme RUPS.</p> <p>Comply. Based on the Company's Articles of Association, any member of the Board of Directors who is not qualified to be a member of the Board of Directors for any reason, including involvement in financial crimes, will have his/her position as a member of the Board declared null and void. If the Board member resigns, it will be decided through the GMS.</p>
<p>Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholder Participation</p>		
<p>Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Strengthen corporate governance through stakeholder participation</p>	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.</p> <p>The company should have a policy on preventing insider trading.</p>	<p>Terpenuhi. Perseroan memiliki kebijakan yang mewajibkan agar seluruh transaksi selalu dilaporkan kepada Perseroan.</p> <p>Comply. The Company has a policy requiring that all transactions are reported to the Company.</p>
	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti-korupsi dan anti-fraud.</p> <p>The company should have anti-corruption and anti-fraud policies.</p>	<p>Terpenuhi. Kebijakan ini disertakan dalam Kode Etik Perseroan dan seluruh karyawan dan pemasok Perseroan menandatangani pakta integritas.</p> <p>Comply. The policy is included in the Company's Code of Conduct and all employees and suppliers sign an integrity pact stating their commitment to uphold the Code.</p>
	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor</p> <p>The company should have a policy on vendor/supplier selection and improvement.</p>	<p>Terpenuhi. Perseroan melakukan seleksi vendor dan pemasok berdasarkan kebijakan procurement internal yang dikelola melalui Divisi Procurement.</p> <p>Comply. The Company selects vendors and suppliers based on its internal procurement policy, which is managed by the Procurement Division.</p>
	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditor.</p> <p>The company should have a policy on fulfilling creditors' rights.</p>	<p>Terpenuhi. Kami memiliki kebijakan untuk memenuhi hak-hak dari kreditor. Hal ini dikelola oleh Divisi Keuangan yang mengatur dan mengelola pembayaran hak-hak kreditor. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam perjanjian, yang mengikat secara hukum.</p> <p>Comply. The Company has a policy on fulfilling creditor's rights. This is managed by the Finance Division, which organizes and manages the payments due to creditors. These rights are also stated in the agreements, which are legally binding.</p>
	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing.</p> <p>The company should have a whistleblowing policy.</p>	<p>Terpenuhi. Dijelaskan pada halaman 229-231 dalam Laporan ini.</p> <p>Comply. It is described on page 229-231 of this Report.</p>
	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>The company have a policy on giving long-term incentives to Directors and employees.</p>	<p>Terpenuhi. Perseroan memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Comply. The Company has a policy on giving long-term incentives to Directors and employees.</p>

Prinsip Principle	Rekomendasi Recommendation	Status Status
Aspek 5: Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure		
<p>Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Principle 8 Strengthen information disclosure.</p>	<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The company should make use of a range of information technology (in addition to their websites) as a means of disclosing information.</p>	<p>Terpenuhi. Saat ini, kami tidak hanya menggunakan situs web, tetapi juga memanfaatkan situs web Bursa Efek Indonesia, e-mail, dan beberapa platform media sosial untuk mengungkapkan informasi tentang Perseroan. Comply. We currently use not only our website, but also the Indonesia Stock Exchange website, email and several social media platforms to disclose information about the Company.</p>
	<p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. The company's annual report should disclose the ultimate beneficial owners of shareholdings of 5% (five percent) or more of their shares, in addition to disclosing the ultimate beneficial owners of shareholdings in the company through the ultimate and controlling shareholders.</p>	<p>Terpenuhi. Rinciannya disajikan pada halaman 66 dalam Laporan ini. Comply. The details are presented on page 66 of this Report.</p>